

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tugas Jabatan : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

- Fungsi Jabatan:
1. Perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kesekretariatan;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan;
 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
 4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Tujuan: Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan kualitas pelayanan pajak daerah yang prima	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lain	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah I

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase Peningkatan Penerimaan PBB-P2	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak PBB-P2 yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah II
		3. Persentase Peningkatan Penerimaan BPHTB	$\frac{\text{Realisasi 2023} - \text{Realisasi 2021}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$ <p>DO : Peningkatan penerimaan pajak BPHTB yang diukur untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak BPHTB dengan satuan persentase yang dapat diukur secara berkala dan tahunan</p>	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Bidang Pajak Daerah III
		4. Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan pajak daerah yang dapat diukur secara berkala dan tahunan	Laporan Realisasi Penerimaan SIKSDA	Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, II, dan III

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, II, dan III
		2. Nilai RB	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.	Hasil PMPRB	Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, II, dan III

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Nilai IPP	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi	Hasil Penilaian IPP	Sekretariat
		4. Nilai SKM	Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ARI SURYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750213 199311 1 001